





---

---

# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

---

PROVINSI JAWA TENGAH 2016

---



## **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 2016**

ISBN	:	978-602-5419-13-3
No. Publikasi	:	33520.1717
Katalog	:	4601008.33
Ukuran Buku	:	10,5 cm x 14,8 cm
Jumlah Halaman	:	vi + 37 halaman

### **Naskah :**

Bidang Statistik Sosial

### **Penyunting :**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

### **Gambar Kulit :**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

### **Diterbitkan oleh :**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

### **Dicetak Oleh :**

CV. Pelita

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

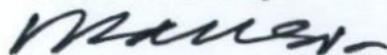
## KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2016 menyajikan data seputar aspek, variable dan indikator IDI di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisa secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Materi yang disajikan dalam booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variable, dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta gambaran ringkas agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat.

Semarang, November 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



DR. Margo Yuwono, S.Si, M.Si



## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Demokrasi	3
II. Apa itu IDI?	5
III. Mengapa IDI Diperlukan?	7
IV. Apa Manfaat IDI?	9
V. Bagaimana Metodologi IDI?	11
VI. Gambaran Umum IDI Indonesia	19
VII. IDI Jawa Tengah 2016	23
VIII. Penutup	37



# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI JAWA TENGAH 2016

IDI 2016

66,71



turun **3,04** point  
dibandingkan  
IDI 2015

## SUMBER DATA

**Dokumen**  
Berupa Perda,  
Pergub, Perbup,  
Surat Edaran, dsb



**Surat Kabar**  
Satu per provinsi dengan oplah  
terbesar atau jangkauan terluas

**Focus Group Discussion (FGD)**  
Untuk mengkonfirmasi dan menambah  
informasi dari *stakeholder*



**Wawancara Mendalam (WM)**  
Untuk mengkonfirmasi dan menambah  
informasi dari narasumber/ahli



Indeks Demokrasi  
Indonesia (IDI) 2016  
dipengaruhi oleh

3

aspek  
demokrasi



1 KEBEBASAN SIPIL

66,06

↓ 13,38 poin



2 HAK-HAK POLITIK

67,24



3 LEMBAGA DEMOKRASI

66,69

↑ 5,21 poin



# I. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assididqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivistis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivistis-komunis

menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekkan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi deficit sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. Freedom House misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free*.

## II. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pegeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi dan hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi, IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.

### III. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lebih lima belas tahun berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauhmana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi? Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor penyumbangannya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya, dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik Sehingga, langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

## IV. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Utamanya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/ demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

## V. Bagaimana Metodologi IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Koding surat kabar dan koding dokumen

Semua peristiwa yang terkait indikator IDI yang diberitakan periode Januari – Desember 2016 pada surat kabar yang telah dipilih, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. *Review* dokumen, semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

FGD berfungsi sebagai untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif . Dalam FGD, hasil *review* surat kabar dan dokumen dijadikan acuan

untuk mengklarifikasi berita/data, dan menggali data yang sangat mungkin luput diberitakan oleh surat kabar.

### 3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

## Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2016

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	2.Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
		4. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	3.Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		6.Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		7. Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender , etnis, kelompok
		9. Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
		10. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

## Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat
		12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
		13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		14. <i>Voters turnout</i>
		15. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	16. Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan
		17. Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
		19. Kecurangan dalam penghitungan suara
		20. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
	8. Peran DPRD	21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD
		22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

## Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
3. Lembaga Demokrasi	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu
		24. Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
		Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif
		26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
		Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif
	11. Peran Peradilan yang Independen	27. Keputusan Hakim yang Kontroversial
		28. Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan koding surat kabar dan koding dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil koding surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada koding Koran atau koding dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan skoring data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen disbanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya,

untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Sejak tahun 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” **sebelumnya** “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” **sebelumnya** “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

## VI. Gambaran Umum IDI Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2016 mencapai **70,09** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata nasional 76,45; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,11; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 62,05.

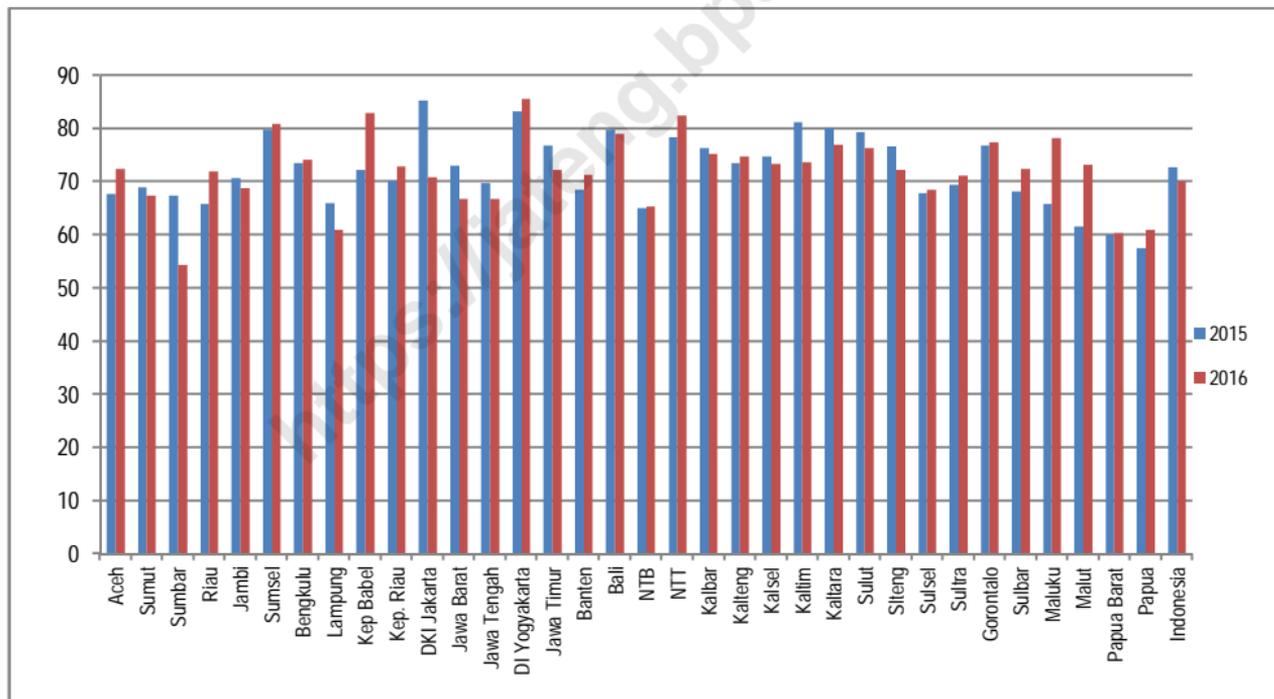
Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dari kategori “baik” yakni DI Yogyakarta naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016; Kepulauan Bangka Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016; Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016,

serta Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016.

Sementara itu, sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”, Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi tahun 2016 mengalami penurunan. Bahkan Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan cukup tajam yaitu sebesar 13,05 poin dari 67,47 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016 dan menyebabkan wilayah ini menjadi satu-satunya provinsi yang masuk dalam kinerja demokrasi kategori “buruk”

**Grafik 1. Perkembangan IDI berdasarkan Provinsi, 2015-2016**





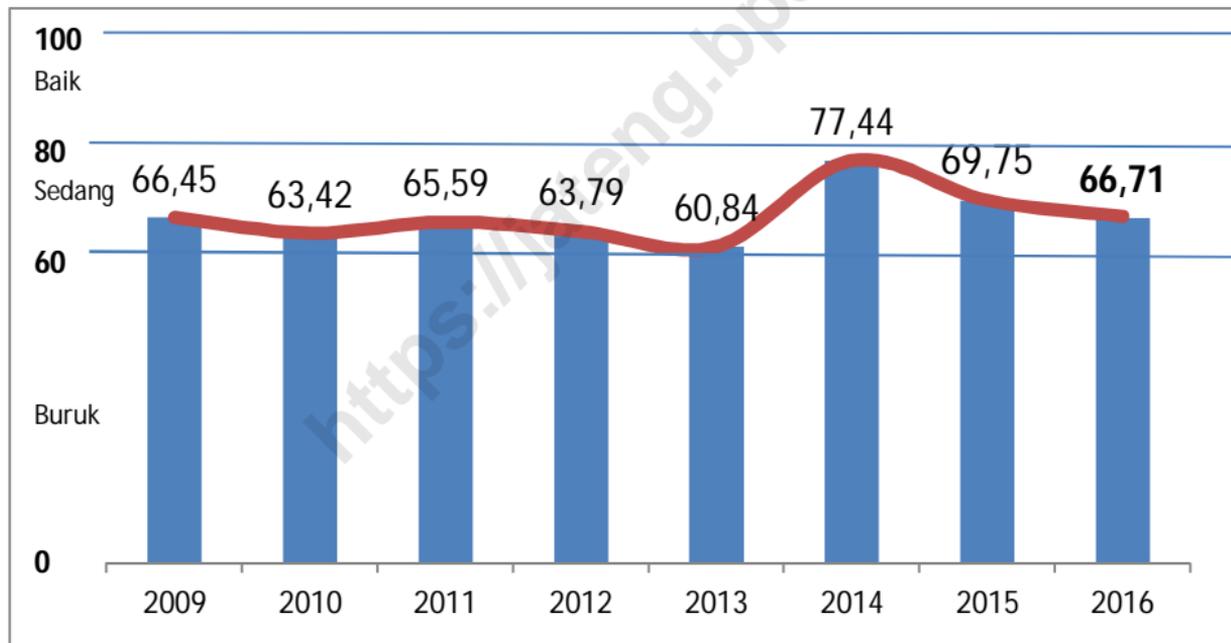
## VII. IDI Jawa Tengah 2016

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2016 sebesar **66,71** dari skala 0 sampai 100, angka ini turun **3,04** poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2015 sebesar 69,75. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI sebesar 66,45. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 77,44; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 69,75 di tahun 2015 dan 66,71 di tahun 2016

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 66,06; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,24; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 66,69.

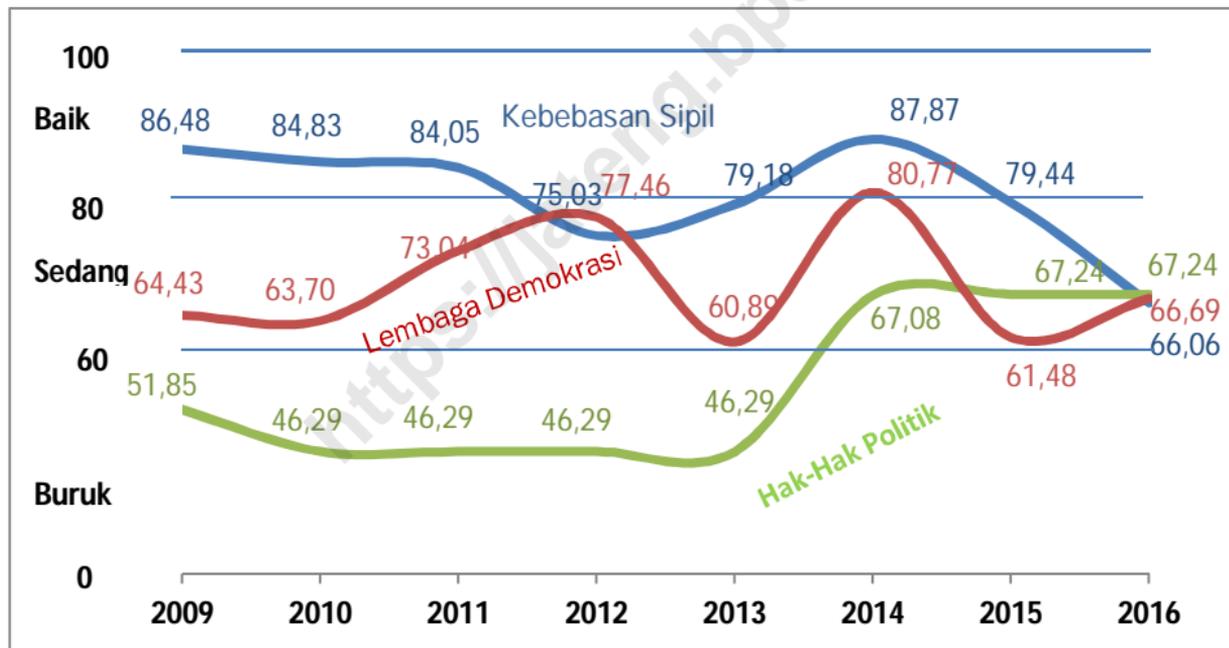
**Grafik 2. Perkembangan IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2016**



Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, sejak 2014 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012, 2013, 2015 dan 2016 aspek ini menjadi kategori “sedang”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2016 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”. Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2016 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun IDI dihitung, sejak tahun 2015 indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil tahun 2016 berada pada posisi di bawah aspek lainnya. Pada tahun 2016 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 66,06 – 67,24.

**Grafik 3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2016**



Menurut nilai indeks variabel IDI 2016 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, tiga variabel mengalami peningkatan dan empat variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, dua diantaranya menurun cukup tajam. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 80,47 poin, dari 92,97 pada 2015 menjadi 12,50 pada 2016. Akibat penurunan tersebut kategori indeks variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat merosot dari kategori "baik" menjadi "buruk".

Variabel Kebebasan dari Diskriminasi juga mengalami penurunan yang cukup berarti, mencapai 16,40 poin. Namun masih dalam kategori "baik", yaitu 96,43 pada 2015 menjadi 80,03 pada 2016. Variabel lain yang juga mengalami penurunan adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan meskipun nilai indeksnya turun 5,07 poin, dari 71,58 (2015) menjadi 66,51 (2016) namun masih dalam kategori "sedang". Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami

penurunan nilai indeks sebesar 2,70 point, yaitu dari 30,13 (2015) menjadi 27,43 (2016). Variabel ini bahkan masih masuk dalam kategori “buruk”

Di sisi lain, variabel Peran Partai Politik meningkat secara bermakna sebesar 25,80 poin, dari 48,49 pada 2015 menjadi 74,29 di 2016. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran Partai Politik, yang jika pada tahun 2015 berada di kategori “buruk” maka pada tahun 2016 masuk dalam kategori “sedang”.

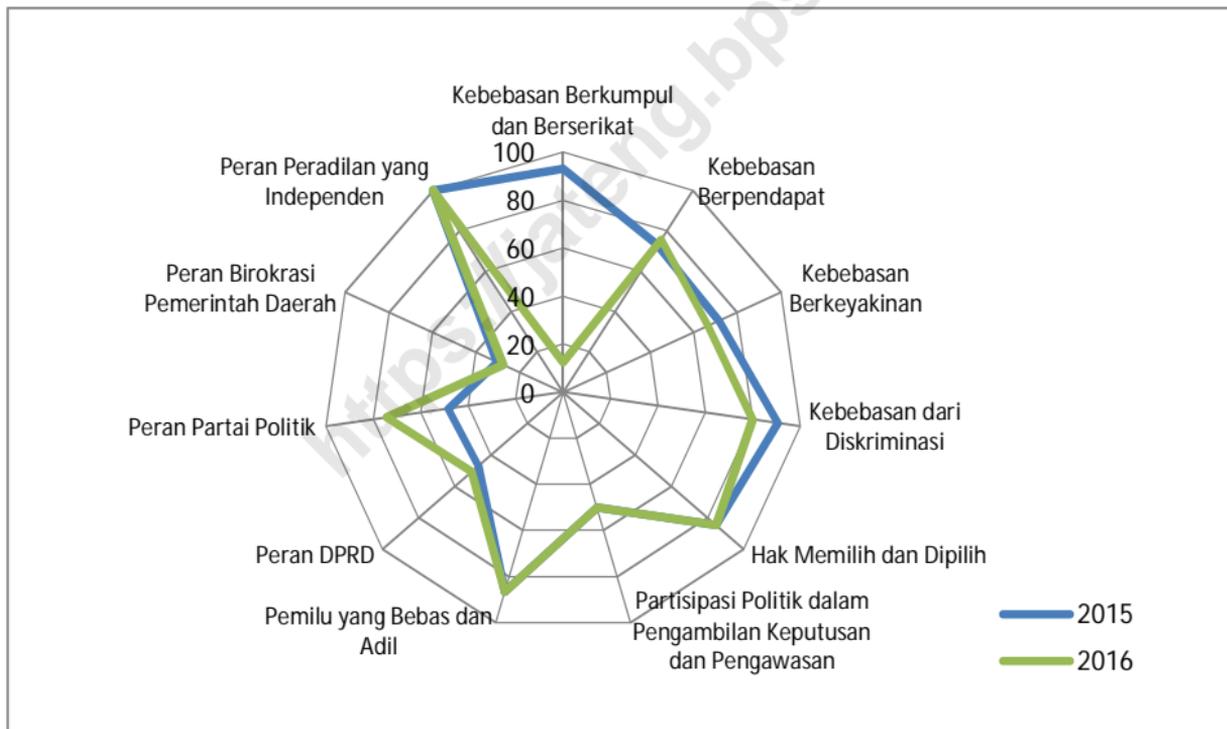
Variabel lain yang juga mengalami peningkatan nilai indeks adalah variabel Kebebasan Berpendapat, meningkat sebesar 2,81 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (72,89 pada 2015 menjadi 75,70 di 2016) dan masih tetap berada dalam kategori “sedang”.

Berbeda halnya dengan variabel Peran DPRD. Meskipun variabel ini meningkat sebesar 3,75 poin dari 46,75 pada 2015 menjadi 50,50 pada 2016, namun peningkatan nilai indeks tersebut tidak mengubah posisi variabel Peran

DPRD yang masih berada di kategori “buruk”. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

<https://jateng.bps.go.id>

**Grafik 4. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Tengah, 2015-2016**



**Tabel 1. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2010 - 2016**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Aspek Kebebasan Sipil</b>		<b>84,83</b>	<b>84,05</b>	<b>75,03</b>	<b>79,18</b>	<b>87,87</b>	<b>79,44</b>	<b>66,06</b>
<b>I</b>	<b>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>	<b>55,00</b>	<b>51,88</b>	<b>81,88</b>	<b>35,00</b>	<b>91,25</b>	<b>92,97</b>	<b>12,50</b>
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	50,00	50,00	90,00	40,00	90,00	100,00	0,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	65,00	25,00	0,00	100,00	43,75	100,00
<b>II</b>	<b>Kebebasan Berpendapat</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>47,20</b>	<b>61,09</b>	<b>76,12</b>	<b>72,89</b>	<b>75,70</b>
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	90,00	56,67	73,33	73,33	87,50	70,83
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	100,00
<b>III</b>	<b>Kebebasan Berkeyakinan</b>	<b>96,42</b>	<b>86,44</b>	<b>75,32</b>	<b>81,31</b>	<b>87,06</b>	<b>71,58</b>	<b>66,51</b>
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00	100,00	91,30	91,30	83,70	86,96
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	75,00	40,00	100,00	87,50	68,75	43,75
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	80,00	40,00	0,00	30,00	70,00	25,00	0,00

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Aspek Kebebasan Sipil</b>		<b>84,83</b>	<b>84,05</b>	<b>75,03</b>	<b>79,18</b>	<b>87,87</b>	<b>79,44</b>	<b>66,06</b>
<b>IV</b>	<b>Kebebasan dari Diskriminasi</b>	<b>100,00</b>	<b>93,05</b>	<b>82,75</b>	<b>96,53</b>	<b>93,23</b>	<b>96,43</b>	<b>80,03</b>
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	75,00	77,50	87,50	87,50	87,50	87,50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	66,67	100,00	90,00	100,00	50,00

**Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2010 - 2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Aspek Hak-Hak Politik</b>		<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>67,08</b>	<b>67,24<sup>9)</sup></b>	<b>67,24</b>
<b>V</b>	<b>Hak Memilih dan Dipilih</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>84,16</b>	<b>84,48</b>	<b>84,48</b>
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	34,62	34,62	34,62	34,62	92,95	92,95	92,95
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00	30,00	30,00	89,65	89,65	89,65
14	<i>Voters turnout</i>	71,26	71,26	71,26	71,26	73,24	73,24	73,24
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	70,00	70,00	70,00	70,00	76,67	80,00	80,00
<b>VI</b>	<b>Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2010 - 2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Aspek Lembaga Demokrasi</b>		<b>63,70</b>	<b>73,04</b>	<b>77,46</b>	<b>60,89</b>	<b>80,77</b>	<b>61,48</b>	<b>66,69</b>
<b>VII</b>	<b>Pemilu yang Bebas dan Adil</b>	<b>94,94</b>	<b>94,94</b>	<b>94,94</b>	<b>94,94</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87	89,87	89,87	73,42	73,42	73,42
<b>VIII</b>	<b>Peran DPRD</b>	<b>42,60</b>	<b>69,48</b>	<b>41,01</b>	<b>43,32</b>	<b>43,22</b>	<b>46,75</b>	<b>50,50</b>
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	63,54	100,00	52,10	54,97	54,81	63,17	56,72
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	0,00	18,18	38,46	41,18	41,18	28,57	80,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
<b>IX</b>	<b>Peran Partai Politik</b>	<b>57,35</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	<b>48,49</b>	<b>74,29</b>
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	57,14	100,00	100,00	100,00	100,00	42,86	71,43
24	% perempuan dalam kepemimpinan partai politik	59,22	80,59	100,00	100,00	99,64	99,19	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Aspek Lembaga Demokrasi</b>		<b>63,70</b>	<b>73,04</b>	<b>77,46</b>	<b>60,89</b>	<b>80,77</b>	<b>61,48</b>	<b>66,69</b>
<b>X</b>	<b>Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>98,48</b>	<b>30,13</b>	<b>27,43</b>
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	-	-	-	-	<b>26,32</b>	<b>10,53</b>
	Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif	90,90	90,90	90,90	90,90	100,00	-	
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	-	-	-	<b>33,33</b>	<b>41,66</b>
	Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif	69,70	69,70	69,70	69,70	96,97	-	
<b>XI</b>	<b>Peran Peradilan Yang Independen</b>	<b>50,00</b>	<b>32,50</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	65,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



## VIII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari Pokja IDI dalam mensosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dengan demikian diharapkan data IDI yang dihasilkan merupakan data IDI yang akurat sehingga pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : [jateng@bps.go.id](mailto:jateng@bps.go.id)

ISBN: 978-602-5419-13-3

